**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH
PLN UIP SUMBAGTENG CABANG SOEKARNO HATTA PADA
PERUMAHAN BUMI TAMPAN LESTARI
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Septriana Rahmawati Ardiani
Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M
Pembimbing II: Dasrol, S.H.,M.H
Alamat: Jln. Jati No. 39 Tangkerang Utara Pekanbaru
Email / Telepon : septriana197@gmail.com / 0813-7165-5565

ABSTRACT

CSR is one of the obligations of companies, especially state-owned enterprises. The company's obligation to CSR as one of the manifestations of social solidarity or corporate concern for the community and environment. CSR has 4 forms, namely: Philanthropy Model of CSR, Economic View of CSR, Social Web Model of CSR and Integrative Model of CSR. In this case, researchers want to know the implementation of CSR by PLN UIP Sumbagteng on Bumi Tampan Lestari housing, considering two extra high voltage airway buildings located in residential areas.

The method used in this research is sociological/ empirical. Data collection was carried out by the dissemination of questionnaires on 50 people who were respondents in the Bumi Tampan Lestari housing estate. In addition, data collection is also done by means of interviews and literature studies.

The results stated that PLN only implements 2 (two) types of CSR, namely Philanthropy of CSR Model and Economic View of CSR. There are still two other types of CSR that have not been implemented by the PLN. in addition, the obstacles experienced by PLN Sumbagteng in the implementation of CSR consists of internal and external. Internally, obstacles are found such as leadership in the company and the size of the area that is the tangent of PLN UIP Sumbagteng. While from external such as local cultural environment and macroeconomic political environment.

Therefore, PLN is expected to carry out CSR that has not been implemented. This aims to improve the quality of life of the community and the environment that benefits both the company itself, the local community and the community in general. In its implementation CSR is also the company's commitment to participate in sustainable economic development.

Keywords: Corporate Social Responsibility - Company - PLN Sumbagteng

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Listrik merupakan sarana yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena sebagai prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang produksi diberbagai sektor. Tenaga listrik merupakan prasarana yang dibutuhkan oleh rakyat dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional, dengan demikian maka tenaga listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.¹

Hal ini sebagai kewajiban dan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah kepada rakyat Indonesia, dalam hal ini rakyat tidak boleh dirugikan, misalnya dalam pembuatan kontrak pemasangan listrik, dan pemadaman listrik secara sepihak. Listrik memiliki peranan yang sangat vital bagi manusia, baik dipedesaan, maupun diperkotaan. Sebagai contoh tenaga listrik sangat di butuhkan untuk berbagai kegiatan, misalnya, kegiatan industri, kegiatan perkantoran, kegiatan rumah tangga, kegiatan bisnis hiburan, kegiatan riset atau pendidikan, serta berbagai kegiatan lain yang sangat membutuhkan tenaga listrik. Besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah di Indonesia, membuat kebutuhan akan listrik terus meningkat, sementara kenyataannya pemerintah dalam hal ini PT. PLN (Persero) memiliki keterbatasan dalam pengembangan di bidang pelistrikan.²

¹ Irpan, Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I*, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 1.

²Irpan, *Op.Cit*, hlm. 14.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja CSR yang sudah dan belum terlaksana oleh PLN UIP Sumbagteng cabang Soekarno Hatta pada perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dan upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan CSR oleh PLN UIP Sumbagteng Cabang Soekarno Hatta pada Perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui CSR apa saja yang sudah dan belum terlaksana oleh PLN UIP Sumbagteng cabang Soekarno Hatta pada Perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan CSR oleh PLN UIP Sumbagteng Cabang Soekarno Hatta pada Perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

a. Bagi penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan Pelaksanaan CSR oleh PLN UIP Sumbagteng Cabang Soekarno Hatta pada Perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru.

b. Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademis dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran – pemikiran teoritis. Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi.³

1. Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Untung,⁴ *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Selain itu, CSR juga memiliki tujuan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal.⁵

2. Teori *Triple Bottom Line*

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam

kondisi keuangan saja, namun juga harus berpijak pada konsep *triple bottom line*, yaitu selain aspek finansial juga peduli terhadap sosial dan lingkungan.⁶ Konsep *triple bottom line* ini diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1998 dalam bukunya yang berjudul *Cannibals With Fork: The Triple Bottom Line 21 Century Business 1998*.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu komitmen bisnis untuk turut berkontribusi dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Pihak perusahaan bekerja dan berinteraksi positif dengan karyawan, keluarga hingga komunitas yang ada di sekitar perusahaan serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.⁸
2. Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁹
3. Sanksi adalah ancaman hukuman akibat sesuatu perbuatan atau suatu

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 122

⁴ Untung Hendrik. B, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm. 32.

⁵ John R. Schemerhorn, *Management For Productivity*, New York, Jhon Wiley & Sons, 1993, hlm. 138.

⁶ Hendrik Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 25

⁷Sebagaimana dikutip dari skripsi Ardi Armandanu dengan judul “*Tinjauan Normatif Pengaturan Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Perusahaan (CSR)*”, hlm. 15. 20 mei 2020 09.29 wib

⁸ Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility saro Voluntary menjadi Mandatory*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 3.

⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.¹⁰

4. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹² Dalam penelitian ini penulis mengkaji terhadap Pelaksanaan CSR PLN UIP Sumbagteng Cabang Soekarno Hatta pada Perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kota Pekanbaru, yaitu pada PLN UIP Sumbagteng Cabang Soekarno Hatta dan masyarakat Perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui apa saja CSR yang sudah dan belum terlaksana dan apa saja hambatan serta kendala dalam pelaksanaan CSR oleh PLN UIP Sumbagteng Cabang Soekarno Hatta

pada Perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terstruktur dimana telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan;
- b. Kajian Kepustakaan, adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur keperustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer;

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori diperlukan.¹³

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1. Defenisi Perusahaan

Secara umum perusahaan dapat di definisikan sebagai kumpulan beberapa orang yang membentuk suatu organisasi dimana sumber daya dasar seperti bahan baku dan tenaga

¹⁰ Marwan, Kamus Hukum *Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 552.

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 77.

kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa untuk pelanggan. Di dalam suatu perusahaan biasanya terdapat pimpinan yang akan memimpin berjalannya suatu perusahaan tersebut, sumber daya manusia yang baik sangat penting untuk kehidupan perusahaan karena dengan adanya sumber daya manusia yang baik kinerja perusahaan pun akan semakin baik.¹⁴

2. Bentuk-bentuk Perusahaan

Melihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedang perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (seluruhnya atau sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan dilihat dari jumlah pemilik, yaitu perusahaan perseorangan¹⁶ atau

perusahaan persekutuan¹⁷. Dilihat dari status pemilik, perusahaan dibagi menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Sedangkan bila dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan dibagi menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum.¹⁸

3. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)

a. Pengertian Badan Hukum

Menurut Ulya Kencana, pengertian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Ia juga menambahkan bahwa badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.¹⁹

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang sudah memiliki status sebagai badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri, dengan tanggung jawab sendiri. Setiap kewajiban atau hutang Perseroan Terbatas dilunasi dari harta kekayaan Perseroan Terbatas itu sendiri.²⁰

¹⁴ Sebagaimana dikutip dari <http://carapedia.com/pengertian definisi perusahaan info2035.html> pada hari sabtu, 5 September 2020 Pukul 10.22 Wib.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Namun dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan ini. pada umumnya masyarakat yang ingin menjalankan usahanya dalam bentuk perusahaan perseorangan ini menggunakan bentuk Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang. <https://materimahasiswa.hukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/perusahaan-perseorangan.html>, diakses tanggal 10 september 2020.

¹⁷ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, 2011, Jakarta, hlm. 98.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ulya Kencana, "Tanggungjawab Perusahaan Teradap Masyarakat. (Kajian Hukum Ekonomi Indonesia)", *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Edisi I, Vol. VI, No. 1 Januari 2018, hlm. 48.

²⁰ Dasrol, *Hukum Ekonomi* (Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis), Alaf Riau, 2020, Pekanbaru, hlm 43.

b. Syarat Berdirinya Badan Hukum

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut, elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai suatu badan hukum, harus terpenuhinya syarat-syarat berikut.²¹

1) Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau AD Perseroan.²² Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola perseroan.

B. Tinjauan Umum Tentang Corporate Social Responsibility

1. Defenisi Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility merupakan suatu elemen penting dalam kerangka keberlanjutan usaha suatu industri dan perkembangan

bisnis. CSR merupakan sebuah konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dengan selaras. Bowen (1953) mendefinisikan CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Terkait dengan hal ini, tanggung jawab sosial Fredrick (1960) menyaakan bahwa pengusaha harus mengawasi operasional dari sistem ekonomi yang memenuhi harapan publik. Ini berarti, pada gilirannya, perekonomian produksi harus dikerjakan sedemikian rupa agar mampu meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi secara keseluruhan.²³

2. Sejarah dan Perkembangan Corporate Social Responsibility

Konsep awal tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dari suatu perusahaan secara eksplisit baru dipaparkan oleh Howard R. Bowen melalui karyanya yang diberi judul “*Social Responsibilities of Bussinessman*“.²⁴ Ada dua hal yang kiranya perlu diperhatikan mengenai CSR pada masa ini. Pertama, pada saat Bowen menulis buku ini dunia bisnis belum mengenal bentuk perusahaan korporasi sebagaimana yang kita ketahui pada saat ini. Kedua, judul buku Bowen saat itu menyiratkan bias gender, karena pada saat itu pelaku bisnis di Amerika masih didominasi oleh kaum pria.

²¹ Sebagaimana dikutip dari skripsi Armandanu dengan judul “*Tinjauan Normatif Pengaturan Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Perusahaan (CSR)*”, hlm. 37. Pada tanggal 15 September 2020 Pukul 08.42 wib

²² Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardias, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta [rima, 2000, Jakarta, hlm. 98.

²³ Totok Mardikanto, *Coorporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Alfabeta, 2018, Bandung, hlm. 86.

²⁴ Sebagaimana dikutip dari Csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Pukul 22.37 Wib.

3. Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility*

Defenisi yang sesahih-sahihnya mengenai CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan masih menjadi perdebatan baik diantara praktisi dari berbagai industri dan juga para akademisi. Seberapa luas makna dari tanggung jawab sosial masih menjadi topic yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Ada yang membatasi CSR hanya pada aspek program dan kegiatan yang bersifat donasi atau *charity*.

4. *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Regulasi di Indonesia

Corporate Social Responsibility diatur dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa, "setiap penanam modal harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan."²⁵ Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.²⁶

C. Tinjauan Umum Pembangunan Berkelanjutan

1. Defenisi Pembangunan Berkelanjutan

Pengertian pembangunan berkelanjutan sejak diperkenalkan oleh World Commission on

Environment and Development (WCED) sebagaimana tertuang dalam Our Common Future atau laporan Brundtland, sampai saat ini masih masuk dalam ranah perdebatan antar para ahli lingkungan. Hal ini menimbulkan banyak inteprestasi definisi mengenai pembangunan berkelanjutan.²⁷

Ordóñez dan Duinker (2010) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, kedua memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio-politik atau alam) dalam waktu tak terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makkhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupaun pada masa mendatang tanpa batas, kelima memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketujuh menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.²⁸

2. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan berkonsentersasi kepada tiga buah pilar yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin tercapainya keharmonisan antara ketiga buah pilar tersebut pelaksanaan pembangunan haruslah

²⁵ Lihat Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁶ Sofyan Djalil, Konteks Konteks Teoritis dan Praktis *Corporate Social Responsibility*, *Jurnal Reformasi Ekonomi* Vol.4 No.1 Januari-Desember 2003, hlm.4.

²⁷ Hartman, Des Jardins dan Macdonald, *Op.Cit.*, hlm. 61.

²⁸ Bruce Mitchell, *et.al.*, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, 2010, Yogyakarta, hlm. 31.

mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Zulkifli (2013), menjelaskan bahwa terdapat empat butir prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:²⁹

- 1) Pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip pertama ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumberdaya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat;

3. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Banyak langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, antara lain, strategi pembangunan berkelanjutan versi *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2001). Menurut konsep OECD, pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan cara: *pertama*, dengan menelaah pandangan-pandangan pemangku penertingan (*stakeholder*) terhadap isu-isu prioritas yang diperlukan dalam menentukan strategi pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, memperkirakan keuntungan dan kerugian yang didapat atau diperoleh dari implementasi strategi pembangunan yang telah dirumuskan.³⁰

²⁹ Sebagaimana dikutip dari skripsi Ardi Armandanu dengan judul “*Tinjauan Normatif Pengaturan Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Perusahaan (CSR)*”, hlm. 47. pada tanggal 12 September 2020 pukul 10.46 wib.

³⁰ Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Mnuju Pembanunan Berkelanjutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 37.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Sejarah berdirinya Kota Pekanbaru diawali dengan cerita panjang yang menemani perjalanan perkembangannya. Kota yang memiliki termparatur panas ini mempunyai pesona tersendiri untuk menarik perhatian masyarakat kota lain untuk berkunjung. Hal itulah yang kemudian menyebabkan keberagaman suku di kota ini berkembang. Banyak masyarakat suku dan budaya lain bermigrasi ke Ibukota Provinsi Riau ini. Hasilnya selain suku aslinya yakni Suku Melayu, Pekanbaru juga ditinggali oleh beberapa suku lain. Di antaranya Minang, Jawa, Batak dan Tionghoa. Namun, keberagaman tersebut tidak menimbulkan perpecahan di kota ini.

2. Letak Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km² menjadi lebih kurang 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 *Kelurahan/Desa*. Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 km². Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.³¹

³¹ *Ibid.*

B. Gambaran Umum Tentang Perusahaan Listrik Negara (PLN)

1. Sejarah Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sumbagteng

PLN telah berdiri sejak sekitar abad ke-19 yang didirikan oleh perusahaan pabrik gula dan teh milik Belanda. Pada saat itu, mereka berinisiasi mendirikan infrastruktur pembangkit listrik untuk keperluan pabrik. Pada saat pasukan kolonial Jepang datang ke wilayah Indonesia, seluruh hak milik perusahaan Belanda diambil alih Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Pada kelanjutannya, pengambilalihan ini hanya bertahan hingga Indonesia meraih kemerdekaan.³²

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. CSR yang sudah dan belum terlaksana oleh PLN UIP Sumbagteng cabang Soekarno Hatta pada perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru

PLN UIP Sumbagteng cabang Soekarno Hatta merupakan jenis perusahaan jasa yang berdiri di kota Pekanbaru. PLN menyediakan jasa pada bidang kelistrikan untuk masyarakat. PLN juga menyediakan dan mendistribusikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik yang bertenaga air, diesel, uap, tenaga angin maupun tenaga surya. Untuk menjalankan usahanya perusahaan membutuhkan bahan bakar minyak, batu bara, gas dan panas bumi. Listrik yang dihasilkan kemudian dikonsumsi oleh industri, komersial, pemukiman dan sarana publik.³³ Selain itu, PLN

UIP Sumbagteng ini juga merupakan bagian dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewajiban ikut berperan serta menunjang program pemerintah dalam rangka melaksanakan program kemitraan untuk mendorong dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi usaha kecil.³⁴

Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. Tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana tanggung jawab sosial mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup.³⁵

Pelaksanaan CSR selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Menggantungkan pelaksanaan CSR kepada kesadaran dan komitmen perusahaan mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan paling mendasar adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak

³² Sebagaimana dikutip dari <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> pada tanggal 7 September 2020 pukul 13.39 Wib.

³³ Sebagaimana dikutip dari <https://wurridewasri.blogspot.com/2013/12/analisis-tentang-pt-pln.html> pada tanggal 17 September 2020 pukul 10.29 WIB.

³⁴ Diana Tantri Cahyaningsih dan Djuwityastuti, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, *Jurnal Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, hlm. 69.

³⁵ *Ibid.*

melaksanakan CSR.³⁶ Sedangkan didalam aturannya bahwa setiap perusahaan multinasional yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan CSR yang di dalamnya menyangkut tentang tanggung jawab sosial perusahaan, hak asasi manusia, lingkungan, tenaga kerja dan anti korupsi.³⁷

1. CSR yang sudah terlaksana

a) Memprioritaskan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat perumahan dalam penggunaan listrik

Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat perumahan dalam penggunaan listrik merupakan salah satu janji pihak PLN yang sudah ditepati. Dalam perjanjiannya yang sudah disepakati oleh pihak PLN terhadap masyarakat adalah ketika masyarakat mendukung penuh akan pembangunan saluran udara ekstra tinggi ini yakni dengan memberikan potongan harga bagi masyarakat perumahan yang akan melakukan pembayaran listrik dalam waktu satu bulan. Dimana CSR dalam bentuk ini memandang sebuah tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut.

b) Melakukan peremajaan lingkungan sekitar perumahan

Selain itu, yang menjadi dasar perhatian dalam pengaplikasian CSR dalam bentuk yang sama ini adalah bahwa perusahaan PLN tidak

melakukan pengrusakan lingkungan. Hal ini sudah sejalan dengan realitas dilapangan. Dimana dengan berdirinya bangunan yang dimiliki oleh PLN tidak mengakibatkan pengrusakan pada lingkungan perumahan bumi tampan lestari khususnya. Kemudian, dengan komitmen yang nyata dari pihak PLN untuk melakukan segala hal untuk menjamin masyarakat sekitar dalam melakukan pencegahan terhadap timbulnya kerusakan di wilayah perumahan bumi tampan lestari. Hal ini dikarenakan dengan jumlah penduduk yang cukup padat juga merupakan hal utama bagi pihak PLN dalam menjamin keselamatan masyarakat yang ada dilingkungan perumahan.

B. Hambatan dan upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan CSR oleh PLN UIP Sumbagteng Cabang Soekarno Hatta pada Perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan CSR tentu tidak seluruhnya dapat berjalan baik dan sesuai dengan harapan. Terkadang dalam implementasinya juga terdapat hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak maksimalnya dari pelaksanaan CSR itu sendiri. Hambatan dan kendala bisa saja terjadi pada konsep internal maupun eksternal perusahaan. Berikut penulis akan menjabarkan hambatan dan kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan CSR oleh PLN UIP Sumbagteng cabang Soekarno Hatta pada Perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru.³⁸

1. Hambatan Internal

³⁸ Wawancara penulis bersama *General Manager* PLN UIP Sumbagteng Henvry Setijabudi pada tanggal 15 September 2020.

³⁶ Joe M. Ricks Jr., "The Effects of Strategic Corporate Philanthropy on Consumer Perceptions : An Experimental Assessment", (New Orleans : Disertasi, University of New Orleans, May 2002), hlm. 1.

³⁷ David Scheffer, *The Five Levels Of Csr Compliance*, Berkeley Journal Of International Law, Artikel West Law, 29 Barkeley J. Int'l L.334

a. Kepemimpinan dalam perusahaan

Kepemimpinan sangat dibutuhkan didalam memimpin suatu perusahaan. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pemimpin akan mempengaruhi hubungan antara pemimpin dan karyawan. Sebaiknya gaya kepemimpinan disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Pimpinan perusahaan yang tidak peka terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup sekitar, jangan diharapkan akan mempedulikan aktivitas sosial. Pada sesi wawancara bersama kepala PLN UIP Sumbagteng cabang Soekarno Hatta, bahwa salah satu yang menjadi hambatan internal perusahaan ini khususnya untuk melaksanakan CSR yaitu perihal kepemimpinan didalam ranah perusahaan.³⁹

b. Cukup luasnya wilayah yang menjadi tanggungan PLN UIP Sumbagteng

Sudah seharusnya CSR dilaksanakan oleh setiap perusahaan atas dasar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai sosial. Pada penelitian ini yang juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan CSR oleh PLN UIP Sumbagteng Cabang Soekarno Hatta ini adalah dengan luasnya wilayah yang menjadi tanggungan PLN Sumbagteng tersebut.⁴⁰ Sebagaimana diketahui sebelumnya, lingkup dari sumatera bagian tengah ini dapat dikatakan cukup luas dan pekanbaru termasuk satu diantaranya. Dari hasil wawancara bersama kepala PLN

UIP Sumbagteng Soekarno Hatta, telah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya CSR sudah dilakukan pada tiap-tiap tempat yang dirasa cukup krusial. Namun, ketika tuntutan untuk menunaikan CSR kepada masyarakat di tiap tempat yang diampu oleh PLN Sumbagteng itu merupakan hambatan tersendiri yang dialami oleh pihak PLN.

**BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

1. CSR yang sudah terlaksana oleh PLN UIP Sumbagteng cabang Soekarno Hatta pada perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru yaitu, *Pertama*, dengan memprioritaskan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat perumahan dalam penggunaan listrik. Dimana maksud akan hal ini adalah dengan apresiasi yang telah diberikan masyarakat akan pembangunan saluran udara ekstra tinggi oleh pihak PLN maka pihak PLN memberikan keringanan atau dispensasi kepada masyarakat perumahan dengan memberi potongan harga kepada masyarakat yang ingin melakukan pembayaran listrik dalam kurun waktu satu bulan. *Kedua*, dengan melakukan peremajaan lingkungan sekitar perumahan. Pihak PLN sudah melaksanakan CSR dalam bentuk ini yang sudah mereka janjikan. Yakni dalam bentuk peningkatan lingkungan perumahan yang semula masih jauh dari kata baik menjadi sangat baik akan hal tersebut. *Ketiga*, dengan memberikan bantuan tunai untuk pembangunan rumah ibadah dan sarana prasarana lainnya. Pihak PLN sudah melaksanakan CSR bentuk ini dan salah satu perwujudannya adalah dengan

³⁹ Wawancara penulis bersama *General Manager* PLN UIP Sumbagteng Henvry Setijabudi pada tanggal 15 September 2020.

⁴⁰ Wawancara penulis bersama *General Manager* PLN UIP Sumbagteng Henvry Setijabudi pada tanggal 15 September 2020.

memberikan bantuan tunai senilai 186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah). Bantuan ini dipusatkan untuk pembangunan rumah ibadah dan perbaikan sarana prasarana sekitar perumahan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan CSR oleh PLN UIP Sumbagteng Cabang Soekarno Hatta pada Perumahan Bumi Tampan Lestari di Kota Pekanbaru terbagi menjadi dua bagian, mulai dari hambatan internal yang berasal dari dalam ranah perusahaan sendiri dan hambatan eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Pada hambatan internal dalam pelaksanaan CSR ini seperti kepemimpinan dalam perusahaan dan cukup luasnya wilayah yang menjadi tanggungan PLN UIP Sumbagteng tersebut. Kemudian, untuk hambatan eksternal yang dialami oleh pihak PLN UIP ini diantaranya seperti lingkungan budaya setempat dan lingkungan politis ekonomi makro. Selain itu, perlu rasanya upaya konkret yang wajib dilakukan oleh pihak PLN akan hambatan yang terjadi, mulai dari meningkatkan sinergitas, komunikasi dan pematangan rencana dalam pelaksanaan CSR itu sendiri.

B. Saran

1. Terkait CSR yang belum terlaksana, penulis menyarankan agar lebih memaksimalkan peran dan segala kesempatan untuk mengaplikasikan CSR tersebut. Dengan keseriusan yang dialami oleh pihak perusahaan untuk meningkatkan citra dan penilaian baik dari masyarakat salah satu caranya adalah dengan menunaikan CSR yang belum terlaksana terhadap masyarakat. Banyak cara yang bisa dilakukan, mulai dari pemberdayaan masyarakat sekitar, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, agar tercapainya suatu konsep

kesejahteraan bagi masyarakat perumahan Bumi Tampan Lestari di kota Pekanbaru.

2. Perihal hambatan yang selama ini melekat dalam diri PLN UIP tersebut, tentu akan menjadi bahan koreksi tersendiri bagi pimpinan perusahaan maupun yang ikut terlibat didalamnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan lebih meningkatkan konsep kepemimpinan bagi pimpinan perusahaan juga merupakan solusi konkret untuk mengantisipasi terjadinya kembali hambatan dalam pelaksanaan CSR. Kemudian dengan mematangkan anggaran tiap tahunnya dan menentukan titik dimana CSR akan dituju juga merupakan suatu hal yang tidak kalah pentingnya. Serta, dengan mengedukasi masyarakat agar terciptanya lingkungan budaya masyarakat yang lebih maju juga merupakan tantangan tersendiri bagi pihak PLN agar hambatan yang selama ini menjadi batu sandungan dapat teratasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, 2011, Jakarta.
- A.B. Susanto, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta : The Jakarta Consulting, 2009.
- Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility saro Voluntary menjadi Mandatory*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 2002, Sinar Grafika, Jakarta.

- Bruce Mitchell, *et.al.*, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, 2010, Yogyakarta.
- Budi Untung, *CSR Dalam Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2014.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2010, Jakarta.
- Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Mnuju Pembanunan Berkelanjutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Dasrol, *Hukum Ekonomi (Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis)*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2020
- David Farrier, *et. al*, *The Environmetal Law, Handbook*, Edition Redfren Legal Centre Publishing, 1997.
- Eka Wenast Wuryanta, dalam Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Volunteer Menjadi Mandatory* 2011, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta.
- Hartman, Des Jardins dan Macdonald, *Business Ethnics, Decision making for Personal Integrity and Social Responsibility Third Edition*.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta.
- HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, 1999, Jakarta.
- Jay A. Sigler, dkk, *The Legal Sources of Public Policy*, (Toronto : Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts, 1977)
- Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Prenhalindo, 2000, Jakarta.
- Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, UI Press, Jakarta..
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, 1986, UI-Press, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT Mandar Maju, 2000, Bandung.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, 2007, Malang.
- Sri Urip, *Strategi CSR; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Peningkatan Daya Saing Perusahaan di Pasar Negara Berkembang*, 2014, Literasi Imprint, Tangerang.
- Suhandari M. Putri, *Schema CSR*, Penerbit Sinar Grafika, 2007, Jakarta.
- Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardias, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta [rima, 2000, Jakarta.
- Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab*

- Sosial Korporasi*), 2014, Bandung, Alfabeta.
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, cet. 1 (Gresik:Fascho Publishing, April, 2007).
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Skripsi**
- Andreas Rasche dan Georg Kell (Editor), *United Nations Global Compact: Achievements, Trends and Challenges*, (New York : Cambridge University Press, 2010).
- Ardi Armandanu dengan judul “*Tinjauan Normatif Pengaturan Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Perusahaan (CSR)*” pada tanggal 3 maret 2020.
- David Scheffer, *The Five Levels Of Csr Compliance*, *Berkeley Journal Of International Law*, Artikel West Law, 29 Barkeley J. Int’l.
- Diana Tantri Cahyaningsih dan Djuwityastuti, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, *Jurnal Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
- J. Brejning, *Corporate Social Responsibility and the Welfare State: The Historical and Contemporary Role of CSR in the Mixed Economy of Welfare* (Farnham: Ashgate Publsihing Company, 2012).
- Joe M. Ricks Jr., “*The Effects of Strategic Corporate Philanthropy on Consumer Perceptions : An Experimental Assessment*”, (New Orleans : Disertasi, University of New Orleans, May 2002).
- John R. Schemerhorn, *Management For Productivity*, New York, Jhon Wiley & Sons, 1993.
- Firdaus, “*Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir Konstitusi*”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 1, No. 1, November 2012.
- Firdaus, *Normativitas Corpoorate Social Responsibility Antara Idealita dan Realitas*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 1, September 2014.
- Firdaus, “*Corporate Social Responsibility: Transformasi Moral ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
- Irpan, *Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi I, Volume 1, Tahun 2013.
- J.J. Asongu, “*The History of Corporate Social Responbility*”, *Journal of Business and Public Policy*, (Vol. 1 Number 2, Spring 2007),hlm.8. Mengutip Wallace B. Donham dalam pidatonya yang disampaikan di *Nort Western University*, “*Business*

started long centuries before the dawn of history, but business as we now know it is new-new in its broadening scope, new in its social significance. Business has not learned how to handle these changes, nor does it recognize the magnitude of its responsibility for the future of civilization.”.

Max Boli Sabon, *Ilmu Negara; Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.

Sofyan Djalil, Konteks Konteks Teoritis dan Praktis Corporata Social Responsibility, *Jurnal Reformasi Ekonomi* Vol.4 No.1 Januari-Desember 2003.

Sutan Remy Sjahdeni, “Corporate Responsibility”, *Jurnal Hukum Bisnis*, 9 Vol. 26. No.3 Tahun 2007.

Ulya Kencana, “Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Masyarakat. (Kajian Hukum Ekonomi Indonesia)”, *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Edisi I, Vol. VI, No. 1 Januari 2018.

W. Friedman, *Legal Theory*, Stevens and Sons Limited, London, 1960.

Wolfgang Friedman, *The Changing Structure of International Law*, London: Stevens and Sons, 1964.

Yusuf Sulfarano Barusman, “Determinant Of Corporate Social Responsibility: Case From Indonesia”, *Jurnal Ilmu*

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Volume 20, No.1 Maret 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Jawab Sosial dan Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

D. Website

<https://pustakabakul.blogspot.co.id/2013/04/teori-bottom-line.html>, pada tanggal 20 Mei 2020.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/Chapter%20II>

<http://carapedia.com/pengertian-definisi-perusahaan-info2035.html> pada hari sabtu, 5 September 2020 Pukul 10.22 Wib.

[Csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf](https://csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf) pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Pukul 22.37 Wib.

<http://www.brass.cf.ac.uk/uploads/HistoryL3.pdf> pada tanggal 5 September 2020 pukul 22.46 Wib.

<https://suryapost.co/sejarah-berdirinya-kota-pekanbaru-kota-bertuah/> diakses pada 7 september 2020 Pukul 13.15 Wib.